

PROSES DAN MEKANISME PERGERAKAN MASSA PADA KEJADIAN KONFLIK SOSIAL BALINURAGA

Ikram¹, Susetyo², Anita Damayantie³, Yuni Ratnasari⁴

¹⁾Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

²⁾Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

³⁾Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

⁴⁾Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

ABSTRAK

Dalam penelitian ini dilakukan analisis konflik dengan melihat pembentukan aktor sebelum terjadinya konflik dan penyerangan dan menganalisis mekanisme pergerakan massa dalam menyerang dan atau saling menyerang pada saat terjadi konflik. Studi kasus menjadi pilihan dalam mendalami permasalahan ini mengingat kompleksitas permasalahan yang akan diteliti. Lokasi atau setting yang diambil berada pada Desa Agom dan Balinuraga, Kabupaten Lampung Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kekerasan selalu dianalogikan sebagai dangkal. Rangkaian model analisis ini, pada akhirnya bermuara pada pengabaian bahwa terdapat proses yang kompleks didalam kasus kekerasan. Memandang kekerasan sebagai suatu peristiwa dirasa kurang tepat dikarenakan kekerasan sesungguhnya adalah konsekuensi dari suatu proses yang kompleks. Demikian juga dengan mudahnya pergerakan massa dikarenakan banyaknya bermunculan atau dimunculkan orang kuat desa yang mampu mempengaruhi banyak orang untuk memenuhi kepentingan orang kuat desa.

Kata Kunci: Kekerasan, Pembentukan Identitas, Pergerakan Massa

ABSTRACT

In this study, conflict analysis was carried out by looking at the establishment of actors prior to conflict and attack and analyzing the mechanisms of mass movements to attack and / or attack each other in times of conflict. Case studies are an option in exploring this problem given the complexity of the problems to be studied. The location or setting taken is in Desa Agom and Desa Balinuraga, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. The results show that violence is always analogous to shallow. This series of analytical models ultimately leads to ignoring that there is a complex process in cases of violence. Viewing violence as an event is inappropriate because violence is actually a consequence of a complex process. Likewise, the movement of the masses is easy because there are many strong village people who are able to influence many people to fulfill the interests of the village strongmen.

Key note: Violence, Identity Establishment, Mass Movement

PENDAHULUAN

Garry Van Klinken (2007) melalui karyanya - Perang Kota Kecil - mencoba memperlihatkan bahwa meletusnya kekerasan komunal atau konflik etnis di beberapa daerah tersebut sangat erat kaitannya dengan ketidakstabilan

iklim politik nasional pada masa tersebut. Kekerasan komunal yang terjadi merupakan bentuk dari pengalihan isu (Klinken, 2007: 12). Kajian dalam penulisan buku ini merupakan hasil pemetaan yang dilakukan di beberapa tempat di Indonesia. Sehingga dengan memanfaatkan data dan asumsi yang tertuang dalam naskah buku ini memiliki kolerasi dengan proses penelitian ini sebagai dasar dalam melihat bagaimana konflik etnis terjadi juga di Desa Agom dan Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.

Dalam proses analisis dan pemetaan informasinya Klinken menggunakan Teori *Dynamic of Contention* karya McAdam, Tarrow dan Tilly (2004) sebagai lensa analisis ketidakstabilan iklim politik yang berakibat konflik. Dalam teori *Dynamic of Contention* terdapat 5 (lima) kunci dalam memahami persteruan politik yakni, pembentukan identitas, eskalasi konflik, polarisasi, pergerakan massa dan pembentukan aktor. Elaborasi dari komponen-komponen ini nantinya yang akan berperan dalam proses penciptaan dan terbentuknya konflik secara komunal sebagai contoh tawuran antar-kampung, antar desa, antar warga atau pada kelompok tertentu seperti pemuda dan batasan etnisitas.

Keberhasilan Klinken dalam mengaplikasikan Teori *Dynamic of Contention* menjadi inspirasi bagi penelitian ini dalam melihat fenomena konflik yang terjadi di Desa Balinuraga yang melibatkan masyarakat lokal (etnis Lampung) di Desa Agom dan pendatang (etnis Bali) di Desa Balinuraga. Perbedaan antara penelitian ini dan karya Klinken adalah terletak pada melihat kesemua tahap dalam Teori *Dynamic of Contention* dalam satu kasus, yaitu konflik Balinuraga dan menjadikan proses pergerakan Massa dalam konflik sebagai fokus utama kajian, sedangkan ke-4 tahap lainnya dilihat dan dianalisis sebagai bagian penting untuk dapat melakukan analisis yang komprehensif tentang pergerakan massa.

Konflik tidak secara serta-merta muncul karena alasan politis atau keterlibatan aktor diluar masyarakat tersebut (faktor pemicu), konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Balinuraga dan masyarakat Desa Agom di Kecamatan Kalinada (Lampung Selatan) diduga memang telah terjadi dalam kurun waktu yang lama. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa, konflik yang terjadi pada akhir tahun 2012 memang diduga dipicu oleh kejadian kecil yang mungkin ditunggangi

oleh kepentingan aktor lain dengan alasan yang mungkin bersifat politis, namun dalam tubuh masyarakat sendiri memang telah terjadi sebuah ketegangan yang cenderung berlangsung sudah cukup lama (faktor *latensi*).

Rangkaian asumsi dan informasi di atas yang tersusun ini menjadikan pondasi bagi penulis untuk melakukan penelitian ini guna mencoba untuk melakukan analisis konflik yang terjadi di Desa Balinuraga dan Desa Agom di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung dengan meletakkan perhatian pada mekanisme yang dilakukan oleh aktor-aktor konflik dalam pergerakan massa dengan mempertimbangkan keadaan serta beberapa aspek kultural masyarakat dan isu-isu yang digunakan sehingga para aktor akan memutuskan untuk ikut bergabung di dalam kelompok massa penyerang. Untuk membantu menjelaskan pola pergerakan masa ataupun keterlibatan aktor dalam konflik ini, penelitian ini akan menggunakan kerangka Teori *Dynamic of Contention* dengan Studi Kasus sebagai salah satu jenis penelitian kualitatif tradisional.

Berangkat dari penjelasan sebelumnya, sangat menarik untuk melihat motivasi keterlibatan aktor dan mekanisme pergerakan massa dalam konflik dan penyerangan yang terjadi di Desa Balinuraga. Dalam kerangka Teori *Dynamic of Contention* dijelaskan bahwa, dalam menjelaskan pola pergerakan massa konflik, menjadi penting untuk sebaiknya menjelaskan serentetan perubahan sosial yang luas mendahului konflik guna mempermudah melihat beberapa faktor penting penunjang dalam menjelaskan pergerakan, seperti pembentukan aktor, motivasi keterlibatan aktor, dan mekanisme pergerakan massa dalam menyerang dan atau saling menyerang pada saat terjadi konflik di Desa Balinuraga.

TINJAUAN PUSTAKA

Ada 3 (tiga) dari 6 (enam) kriteria sifat dasar yang menunjukkan bahwa adanya konflik dalam masyarakat majemuk merupakan sebuah konsekuensi dari kehidupan bersama masyarakat yang beragam. Meskipun kehidupan bersama cenderung dipaksakan dan coba dibangun atau *nature* oleh masyarakat beragam dalam satu wilayah yang relatif kecil, pada akhirnya dapat menyebabkan konflik dan penyerangan. Ini yang ditunjukkan dalam kehidupan bersama dengan masyarakat yang beragam - Jawa, Lampung, Bali - di Desa Agom dan Desa Balinuraga yang juga tidak dapat menghindari untuk tidak terjadi konflik.

Dalam ranah kajian ilmu sosial beberapa ahli Sosiologi (khususnya bidang kajian pendekatan konflik) menganggap bahwa konflik-konflik dan kontradiksi-kontradiksi intern dalam masyarakat dapat merupakan sumber bagi terciptanya perubahan-perubahan sosial ada dan di masyarakat. Terjadinya perubahan sosial berdasarkan pandangan oleh para penganut pendekatan konflik tidak saja dipandang sebagai gejala yang melekat dalam kehidupan setiap masyarakat, akan tetapi lebih dari pada itu bahkan dianggap bersumber dari dalam faktor-faktor yang ada dalam masyarakat itu sendiri (Nasikun, 2006: 21).

Oleh karena itu, struktur sosial masyarakat dan perubahan sosial merupakan hal yang memiliki posisi sangat penting dalam upaya memahami, mencerna dan menganalogikan perbedaan yang terjadi, sekaligus menjadi pijakan penting dalam rangkaian asumsi sebelum membahas tentang bagaimana konflik yang terjadi serta akan bermuara pada asumsi dalam menganalisis pergerakan massa dalam konflik dan penyerangan di Desa Bali Nuraga, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Kerusuhan dalam Lensa Teori *Dynamic Of Contention*

Dynamic of contention atau Politik Seteru merupakan pendekatan dan teori dalam memahami isu-isu gerakan sosial masyarakat. *Dynamic of contention* merupakan sebuah proyek besar yang dikembangkan oleh Doug McAdam, Tilly dan Tarrow dalam memahami fenomena gerakan sosial yang terjadi di berbagai konteks di sebagian belahan dunia. Namun lebih dari itu, banyak bagian dari *Dynamic of contention* menyangkut apa yang disebut sebagai “*transgressive contention*” yaitu perseteruan yang terjadi supra politik formal dan bisa mencakup protes- protes yang diwarnai kekerasan (Klinken, 2007: 17) sehingga pada akhirnya teori ini tidak hanya diaplikasikan di ranah gerakan sosial, namun lebih luas juga di aplikasikan dalam ranah konflik, baik itu yang beraras demokratisasi maupun nasionalisme.

McAdam, Tilly, dan Tarrow membangun teori *Dynamic of contention* berdasarkan lima belas studi kasus yang mencakup perseteruan-perseteruan non-Barat di antaranya protes-protes Tienmen pada tahun 1989, perseteruan non-demokrasi seperti halnya “Huru-Hara” Hindu-Muslim di India, atau gerakan-gerakan di bawah kondisi-kondisi negara yang sedang lemah misalnya

pemberontakan “Mau-Mau” di Kenya. *Dynamic of contention* sendiri menitik beratkan permasalahan pada kerusuhan yang terjadi di luar kebiasaan dan berada di luar tubuh sebuah organisasi dan lebih melihat kerusuhan yang terjadi di ranah interaksi kolektif dan tidak dapat diterapkan dalam konteks satu objek ataupun objek yang homogen.

Dalam karya besarnya - *Dynamic of contention* - McAdam, Tilly dan Tarrow menjelaskan bahwa terdapat kurang lebih 44 mekanisme yang dapat dilakukan dalam menjelaskan dan menganalisis sebuah peristiwa secara jelas, baik itu yang bersifat demokratis maupun yang bersifat nasionalisme. Meskipun demikian, dalam konsep ini, terdapat 5 mekanisme yang paling penting dan paling fundamental dalam menjelaskan kerusuhan ataupun peristiwa (Klinken, 2007: 17-18), antara lain; a) *Identity Formation* (pembentukan identitas); b) *Scale shift* (atau *escalation/ eskalasi*); c) *Polarization* (polarisasi); d) *Mobilization* (pergerakan); e) *Actor constitution* (pembentukan aktor);.

Kelima mekanisme di atas dianggap merupakan yang paling fundamental dan penting dalam menganalisis peristiwa politik. Namun demikian, meskipun *Dynamic of contention* sendiri merupakan sebuah kerangka teoritik dengan persepektif gerakan sosial baru, kerangka teoritik ini juga bukan suatu hal yang baru jika digunakan pula dalam menganalisis beberapa kerusuhan atau konflik-konflik yang telah terjadi di Indonesia.

Selain itu, pembentukan identitas dalam rentetan konflik komunal sendiri menempati posisi yang sangat penting untuk melihat mesin ataupun penggerak masing-masing kelompok sosial yang sedang berkonflik. Polleta dan Jasper (2001) menjelaskan bahwa:

“...kita telah mendefinisikan identitas kolektif sebagai hubungan kognitif, moral, dan emosional individu dengan komunitas, kategori, praktek, atau lembaga yang lebih luas. Identitas merupakan persepsi akan hubungan atau status kebersamaan yang mungkin sekedar dibayangkan dan tidak selalu harus dirasakan bersama-sama secara langsung, dan identitas ini berbeda dengan identitas pribadi meskipun mungkin bagian dari identitas pribadi.” (Dalam Klinken, 2007: 107).

Identitas sendiri terbentuk berdasarkan interaksi yang melintasi batas-batas identitas kelompok sosial tersebut dan identitas etnis sendiri terbentuk dan berkembang berdasarkan persaingan bukan melalui isolasi atau keterasingan.

Literature mengenai identitas sendiri memiliki berbagai persepektif dan sudut pandang diantaranya yang bersifat Sosiologis dan yang bersifat Psikologis. Secara Sosiologis, bahasan tentang identitas ditempatkan kuncinya pada kerapatan jaringan sosial yang mewarnai identitas tersebut (interaksi). Sedangkan secara Psikologis, menempatkan perhatiannya tentang identitas pada titik apa yang orang-orang ketahui (kognisi), dan dalam hal ini identitas yang dimaksudkan oleh Doug McAdam, Tilly dan Tarrow dalam *Dynamic of contention* adalah persepektif Sosiologi yang lebih menekankan pada titik interaksi jaringan sosial identitas kelompok tersebut.

Pergerakan Massa dari persepektif *Dynamic of Contention*

Dalam menganalisis konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Balinuraga dan masyarakat Desa Agom, peneliti mencoba meminjam konsep *Dynamic of contention* dalam menganalisis pola pergerakan massa yang dilakukan oleh masing-masing pihak ketika konflik berlangsung. Dengan permasalahan penelitian yang telah diajukan, maka peneliti akan memfokuskan perhatian pada mekanisme pergerakan massa yang disajikan dalam konsep *Dynamic of contention*. Namun demikian, dalam analisisnya nanti tidak menutup kemungkinan bahwa peneliti juga sedikit banyak akan membahas tentang *actor constitution* atau pembentukan aktor karena tidak menutup kemungkinan nantinya ketika mencoba untuk memahami pola pergerakan massa di masing-masing pihak yang berseteru nantinya juga akan membahas beberapa mekanisme lain yang telah ada diatas sebagai sebuah kelengkapan dalam mencoba menganalisis secara mendalam dan menemukan jawaban penelitian secara utuh.

Dynamic of contention juga menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) mekanisme dasar dalam memahami pergerakan massa, diantaranya: *Pertama*, sederetan proses- proses perubahan sosial yang luas mendahului konflik. *Kedua*, tiap-tiap pihak melihat ancaman datang dari pihak yang lain dan/ atau melihat kesempatan- kesempatan yang menguntungkan dirinya sendiri. *Ketiga*, organisasi- organisasi yang sudah ada diberi tujuan-tujuan baru. *Keempat*, organisasi- organisasi melancarkan aksi-aksi kolektif inovatif untuk menentang pihak lain. *Kelima*, pada gilirannya hal ini mengarah pada sebuah eskalasi dalam hal rasa

ketidakpastian, yang pada gilirannya kembali memperbesar ancaman atau kesempatan tadi.

Konflik yang terjadi antara masyarakat etnis Bali dan masyarakat etnis Lampung merupakan sebuah manifestasi dari tumpukan- tumpukan ketegangan yang telah terjadi bertahun- tahun lamanya antara kedua masyarakat etnis ini. Dengan menggambarkan historisasi konflik yang terjadi, yang telah digambarkan dalam rumusan masalah pertama penelitian ini, ditujukan agar gambaran tentang pola komunikasi antar etnis pra-konflik dapat membantu menganalisis motivasi gerakan maupun masing- masing aktor dalam mengelola konflik ini.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi atau setting penelitian ini di Desa Agom dan Balinuraga, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Teknik dan proses pengumpulan data berasal dari 6 (enam) sumber, yaitu: dokumen, rekaman arsip, wawancara, pengamatan langsung, dan perangkat-perangkat fisik. Teknik pengelolaan data melalui tiga tahap utama yaitu: (1) Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis dengan membuat transkrip wawancara, memilah-milah dan menyusun data kedalam kategori yang berbeda dan disesuaikan dengan fokus permasalahan dari penelitian ini, (2) Membaca keseluruhan data dalam rangka membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Gagasan umum apa yang terkandung dalam gagasan partisipan, dan Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data kedalam 3 (tiga) bagian yaitu Eskalasi, Pembentukan Aktor, dan Pergerakan Massa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik dengan Kekerasan

Dalam teori dikatakan *ordinary and everyday violent conflict* merupakan salah satu sifat dari peristiwa konflik kekerasan yang rumit untuk dideskripsikan. Proses analisis berbagai peristiwa yang terjadi seakan-akan secara spontan, acak, tidak terorganisir/terpola merupakan bentuk dari kermitan yang muncul dalam proses pemahamannya. Disisi lain Ketika meletakkan konflik kekerasan sebagai peristiwa kerumitan lainnya hadir. Proses kompleks ini tidak hanya dapat dilihat

sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap hukum serta aparat penegak hukum, bahkan bisa jadi sebagai bentuk frustrasi masyarakat yang terkelompok secara sosio-ekonomi terrendah.

Dinamika Kapital dan Pergerakan Massa

Kondisi ekonomi penduduk lokal akan terus meredup akibat tindakan penduduk pendatang melakukan akumulasi dengan penjarahan dan menguasai sektor perdagangan dan sektor informal. Akibatnya, angka tertinggi pengangguran ada pada kelompok pemuda. Kondisi ini berimplikasi pada orientasi masyarakat pendatang memiliki kecenderungan untuk memperoleh pekerjaan sebagai PNS atau Pegawai pemerintah. Dapat dikatakan kondisi ini mengarahkan menuju ketergantungan pada sumber negara baik secara formal dan resmi ataupun melalui aktivitas *black economy* atau *rent seeking* melalui *network* yang ter-patron guna kepentingan kelompok. Pada dasarnya, ketergantungan pada negara memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi penduduk lokal. Ketergantungan juga semakin menguat dengan model *state-led developmentalism* (pembangunan daerah dipacu, perluasan peran birokrasi, serta penciptaan lapangan kerja bagi penduduk lokal melalui anggaran pembangunan). Efek dari model ini adalah meningkatnya jumlah PNS dan ASN secara dramatis dan pengambilan pungutan dari sumber keuangan negara yang akan bermuara pada penurunan jumlah pekerja pada sektor pertanian (Klinken, 2007). Asumsi sebelumnya mengisaratkan peningkatan jumlah angkatan kerja dan lulusan pendidikan formal akan berkolerasi dengan laju pertumbuhan urbanisasi.

Elaborasi dari kondisi-kondisi ini bermuara pada kekerasan dalam bentuk komunal seperti tawuran yang kemudian berkondensasi dengan kontestasi dalam mengakses keuangan negara. Pelibatan pemuda dalam model konflik ini merupakan kondisi yang mendominasi dan memimbulkan korban jiwa dan memiliki tingkat ketegangan yang cukup besar. Pada prakteknya anggapan yang berkembang di kelompok masyarakat dan pemerintah konflik komunal ini terjadi diakibatkan oleh konsumsi minuman keras dan pesta. Akan tetapi, pada dasarnya proses pembentukan kekerasan dan konflik antar kampung/ desa ini merupakan hal yang jauh lebih kompleks. Kompleksitas ini terjadi dikarenakan model kekerasan dan konflik ini terjadi dikarenakan digawangi dan ditunggangi oleh

kelompok kekerasan tertentu yang dikenal dengan istilah "orang kuat lokal" (elit kampung, elit desa preman, atau orang-orang berpengaruh lainnya) yang sebelumnya telah memiliki jejaring patronase.

Peneguhan Identitas

Ada proses yang beragam tentang menjadi atau menjadikan "orang kuat lokal" yang umumnya berada di beberapa perkampungan yang merujuk pada kekuasaan dan kekuatan individu untuk memobilisasi massa. Proses tentang bagaimana 'penokohan' tersebut terjadi sangat beragam. Beberapa orang, misalnya, menjadi orang kuat lokal dikarenakan ia merupakan elit di kampung/desa, sebagian yang lain ditentukan oleh kekuatan dan kebesaran pengaruh keluarganya di tingkat kampung/desa, dan sebagian yang lain ditentukan oleh pengaruh politiknya atau kekayaan yang dimilikinya.

Proses politik yang lebih besar acap kali merupakan salah satu komponen utama yang mempengaruhi dalam memfasilitasi seseorang individu menjadi "orang kuat lokal". Pada posisi inilah kemudian peranan kelas perantara (*intermediary class*) memainkan peranan melalui pemburuan pungutan dan *black economy* (pendapatan gelap) yang diambil dari sumber-sumber negara. Hubungan sosial yang terorganisir dan mendominasi merupakan ciri utama dari kelompok kelas ini sehingga jejaring yang terbentuk menjadi sarana strategis dalam mengakses proyek negara pada level lokal. Dengan kata lain, secara efektif kelompok pada kelas ini dapat memblokir proyek pembangunan negara dengan jalan menghubungkan negara dengan *black economy*.

Kondisi ini kemudian membawa pada kemudahan dalam mengatur sumber ekonomi non-negara sekaligus melakukan *rent-seeking* dengan mengelaborasi praktik regulatoris serta hubungan personal dan reputasi individual dengan kekuatan ekstralegal, ditambah dengan asosiasi dengan jejaring "orang kuat lokal" yang bertopang pada etnisitas atau agama sebagai identitas tersendiri (Klinken, 2007: 75-76).

Pada tahapan formasi dan peneguhan identitasnya kelas perantara ini turut mempengaruhi bagaimana orang kuat lokal ini terbentuk. Pada umumnya terbentuk melalui proses keterwakilan (electoral) politik di masyarakat. disisi lain juga hal ini dapat terbentuk dengan enciptaan *public spare activity* (aktivitas pada

ruang-ruang publik) seperti tempat nongkrong untuk berkumpul dan meminum-minuman keras atau sebagai ruang sebagai wadah bergerombol dan berkumpul. Hal ini dilakukan sebagai stimulant yang dapat dilakukan agar nantinya individu-individu yang ada pada ruang yang telah diciptakan dapat berasosiasi dan memiliki kesamaan frame pemikiran sehingga dapat terbentuk solidaritas kelompok. Begitu besarnya pengaruh yang dapat diberikan dari penciptaan ruang – ruang publik ini pada akhirnya dijadikan senjata atau strategi yang dapat digunakan oleh ruang politik yang lebih besar. Dalam praktiknya para kandidat politik memiliki peranan besar dalam menyumbangkan tempat berkumpul sekaligus memberikan ruang pada orang kuat lokal untuk menjadi pemimpin kultural sebagai sarana memobilisasi suaranya untuk kandidat tersebut.

Hal yang sama juga terjadi pada posisi “orang kuat lokal”, kondisi ini merupakan sebuah momentum yang dapat dimanfaatkan dalam mengakses keuntungan secara ekonomi dalam skema yang tidak resmi atau *rent-seeking*. Muara dari kondisi ini adalah pergeseran pada ruang-ruang yang diciptakan dari yang pada awalnya merupakan ruang untuk melakukan kegiatan konsolidasi politik pada kondisi dan situasi politik elektoral bergeser menjadi ruang yang dapat dimanfaatkan untuk membangun dan membentuk solidaritas di dalam kampung atau desa oleh orang kuat lokal guna memanfaatkannya dalam momen-momen tertentu.

Dalam politik electoral dikenal juga istilah yang disebut dengan “agen pengamanan” untuk kandidat tertentu. Agen pengamanan ini pada praktiknya diisi oleh orang kuat lokal dan memiliki peran yang sangat signifikan dan berkaitan langsung dengan suara keterwakilan dari kandidat politik. Sedangkan pada momen pasca electoral atau setelah masa perhelatan politik dilangsungkan, orang-orang kuat lokal dan berpengaruh atau dapat dikatakan juga berperan sebagai agen pengamanan acap kali menjadi pionir yang dapat diandalkan dalam proses terselenggaranya proyek-proyek pemerintah yang berskala lokal dan bersentuhan langsung pada level masyarakat. Seluruh proses yang terangkai ini pada dasarnya adalah sebuah proses yang dimanfaatkan oleh kandidat electoral dalam membangun, memupuk dan memelihara kantong-kantong politik (dukungan politik) serta relasi linier antara kelompok-kelompok kelas perantara yang telah

terbentuk sebelumnya dengan penciptaan jejaring yang lebih massif dengan jaringan orang kuat lokal lainnya.

Rangkaian asumsi ini kemudian mengarahkan kita pada suatu kondisi dimana sebuah proses dan rangkaian jejaring yang dipersiapkan merupakan modal penting dalam model politik electoral yang dilakukan seperti yang terjadi pada kontestasi politik di Indonesia. Kondisi ini tentu saja tidak mengherankan dikarenakan jika eskalasi konflik dan sebuah perkelahian bersifat komunal dan berkelompok yang terjadi pada skala antar kampung/desa teresonansi dengan banyak hal dan dapat ditentukan juga dari sejauhmana keterlibatan aktor-aktor yang disebut dengan orang kuat lokal bermain pada model konflik ini.

Pergerakan Massa

Pembentukan identitas melalui stigma merupakan salah satu bentuk dari proses pembentukan massa. Jika sebelumnya telah dibahas bagaimana proses pembentukan massa dari pola patronase maka dalam konstruksi konsep pergerakan masa ini akan menhggambarkan bagaimana pergerakan massa terpengaruh melalui pembentukan melalui stigma. Stigma selalu memiliki peranan penting dalam situasi konflik terlebih dalam hal konflik yang bersifat *collective action* (komunal). Penyebaran wacana yang acapkali diterima begitu saja sebagai suatu kebenaran yang mutlak bagi kelompok tertentu sekaligus memiliki fungsi sebagai isolasi kelompok datu dengan kelompok lainnya merupakan wujud dari tersedimentasinya stigma dalam suatu kelompok.

Dalam hal ini, Stigma juga memiliki fungsi sebagai rangkaian proses dalam pembentukan “identitas kolektif” serta memiliki peranan yang begitu penting dalam menentukan momentum koordinasi konflik. Kondisi ini merupakan sebuah tahapan dimana penyeragaman pemikiran dan pola tindakan dari komunitas dan kelompok tertentu. Dalam konteks konflik komunal atau pekelahian antar warga, kelompok, kampung, dan Desa, stigma umumnya bekerja dalam bentuk tuduhan bahwa suatu kelompok tertentu memiliki kebanggaan atas tawuran dan perkelahian. Kondisi ini yang kemudian mampu mengalihkan konstruksi berfikir secara umum dan menjadikan proses konflik yang terjadi dapat dimanfaatkan sebagai benteng atau cover dari situasi yang sesungguhnya terjadi sehingga dapat tersamarkan. Asumsi ini terkaburkan dikarenakan informasi

bahwa kampung memiliki banyak ‘preman’ yang memelihara wibawa dan gengsi daerahnya, suatu kampung banyak melahirkan orang-orang kuat lokal, pejabat pemerintahan, dan akademisi dan lain sebagainya. Kondisi ini Yng kemudian berhasil membangun stigma yang bermuara pada memperkuat dan menstrukturkan identitas kampung yang kuat sekaligus dapat dilakukan proses identifikasi serta mempertebal perbedaan dan gab antar kelompok dengan kelompok lainnya.

Konflik dan kekerasan komunal dengan pengerahan massa tidak bisa diabaikan. Berbagai alasan untuk segera mengatasi seringnya terjadi kekerasan rutin, kekerasan komunal, di antaranya *Pertama*, teridentifikasinya suatu *tragedy of endowment*. Hal ini merupakan suatu kondisi dimana titik tekannya berada pada kekayaan sumberdaya alam yang melatarbelakangi terjadinya konflik dan kekerasan serta menjadi ajang perebutan. Bentuk kekerasan konflik yang berlatar pada sumber daya alam pada umumnya meliputi konflik di kawasan desa, perkebunan, dan sumberdaya ekonomi lainnya dan merupakan konflik yang memiliki kecendrungan muncul di berbagai wilayah dan jumlahnya sangat banyak. Menilik pada kondisi konflik dengan typology ini maka dibutuhkan upaya yang sistematis dalam proses mediasi dan penyelesaiannya. Jika dalam penyelesaian permasalahan konflik ini tidak berjalan sesuai dengan kebutuhan penyelesaiannya maka, konflik jenis ini akan menjadi bentuk konflik yang laten dan berkepanjangan lalu bermuara pada siklus kekerasan yang tidak ada habisnya. Muara dari kondisi ini akan menciptakan krisis sosial-ekologis yang tiada tara.

Kedua, komunalisme dan premanisme atau bosisme serta patronase terhadap *local strongment* (orang kuat lokal) sebagai bentuk jaringan patron klien. Jika kondisi ini semakin menguat, implikasi kondisi yang sangat mungkin terjadi adalah ‘*defisit keadilan dan perdamaian*’. Dengan kata lain, kondisi dimana kekerasan politik, kekerasan yang berbasis identitas komunal menjadi fitur utamanya. Kondisi ini akan mengharuskan dimana para aktor yang memiliki peran sebagai *local strongmen* memiliki bentuk-bentuk penguasaan yang berimplikasi menjadi suatu tindak kekerasan serta premanisme yang bersifat criminal.

Ketiga, kondisi dimana terjadi pelemahan kapasitas pada pemerintah daerah dalam memerankan dirinya yang berfungsi sebagai aktor pencegahan, penanganan dan transformasi konflik serta perdamaian terus terjadi maka, hal ini akan memperkuat posisi dan jaringan patronisme dan komunalisme sekaligus kerisis pengelolaan sumberdaya alam. Muara dari kondisi ini adalah sebuah fenomena dimana gagalnya kepemimpinan daerah. Kegagalan kepemimpinan ini merupakan bentuk kegagalan dalam melaksanakan fungsi-fungsi dasar pemerintah sebagai aparat dalam hal pemenuhan kebutuhan layanan dasarnya. Kondisi yang mungkin terjadi adalah terbentuknya faksi-faksi politik dan kelompok-kelompok kepentingan yang bertikai dengan menggunakan instrument kekerasan baik secara simbolik ataupun terbuka dalam mencapai tujuannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan kajian yang dilakukan dapat dikatakan bahwa, dewasa ini kekerasan seakan-akan hanya di pandang sebagai suatu fenomena yang terjadi dan merupakan kondisi yang acap kali terjadi sehingga dapat dipandang sebagai fenomena yang banyak dan biasa saja. Hal senada juga terjadi dalam hal analisis kekerasan run yang hanya bertumpu pada kombinasi tekanan populasi yang berhadapan dengan kelangkaan sumber daya alam yang berdekatan pada asumsi dan masalah keadilan sosial dan perebutan akses terhadap sumber daya dan diukur dengan menggunakan ketimpangan distribusi akses sumber peggidupan (pendapatan) dan sumberdaya lainnya. Cara pandang dan model-model analisis ini pada akhirnya hanya akan bermuara pada pandangan bahwa konflik dan berbagai kasus kekerasan merupakan kondisi dan fenomena yang rutin terjadi tanpa melihat bahwa terdapat berbagai hal yang merupakan rangkaian proses penting dan kompleks sebagai pemicu konflik itu terjadi.

Berangkat dari rangkaian hasil dan pembahasan yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa kekerasan semestinya tidak dapat hanya dipandang sebagai sebuah peristiwa. Akan tetapi kekerasan merupakan sebuah konsekuensi logis dari suatu proses yang kompleks dengan melibatkan berbagai aktor dan kekuatan-kekuatan yang berada didalam dan diluar kelompok dan komunitas. Demikian juga dengan mudahnya pergerakan massa dikarenakan banyaknya bermunculan

atau dimunculkan orang kuat desa yang mampu mempengaruhi banyak orang untuk memnuhi kepentingan orang kuat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Bungin. 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burton, John. 1993. *Conflict: Human Needs Theory*. London. St. Martins Press.
- Creswell, John. W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faturrochman. 1993. “Perang Kecil: Problem yang Tak Berakhir”, *Jurnal Psikologi, Universitas Gadjah Mada*. No. 2.
- Klinken, Gerry van. 2007. *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- McAdam, Doug, Sidney Tarrow, Charles Tilly. 2004. *Dynamics of Contention*. New York: Cambridge University Press.
- Nasikun. 2006. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tadjoeddin, Muhammad Zoelfan. (2007). *A Future Resource Curse in Indonesia: The Political Economy of Natural Resources, Conflict and Development*. Crise Working Paper No. 35 October.
- Tadjoeddin, Muhammad Zoelfan and Mansoob Murshed, (2008). “Decentralization Conflict Abating? Routine Violence and District Level Government in Java, Indonesia”. *Microcon Research Working Paper 7*, July 2008.
- Tadjoeddin, Muhammad Zoelfan (et, al) (2011) “Routine Violence In The Island of Java, Indonesia: Neo-Malthusian and Social Justice Perspective”. Unpublished paper.
- Tarrow, Sidney G. (1994). *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*. New York: Cambridge Press.
- Yin, Robert K. 2011. *Studi Kasus, Desain&Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.